



Faktor-Faktor Penentu Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat

Marcus R. Maspaitella¹, Lillyani M. Orisu², Rahel Y. Tiwery³

¹Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Papua, m.maspaitella@unipa.ac.id

²Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Papua

³Alumni Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Papua

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.32830/jfres.v1i1.1013.g761>

Received: April 2018; Accepted: June 2018; Published: September 2018

Abstrak

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Implikasinya adalah bahwa daerah diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menggali segala potensi yang ada di daerah, guna mendukung kemampuan keuangan daerah yang menjadi modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Papua Barat pada periode 2010-2015. Jumlah sampel penelitian ini adalah 7 kabupaten/kota. Estimasi model dianalisis dengan menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Papua Barat.

Kata kunci: belanja daerah, PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah

Abstract

Regional autonomy has provided a rightful authority for local governments to set and manage their own governmental affairs. The implication derived from this regulation is that local governments have to fulfill the regions' needs as well as to explore much more potentials owned. This can enhance the capacity of local governments that could be a useful capital in financing operational programs. This research aims to analyse the influence of region own source revenue, balance fund, and other lawful local revenues on local government expenditure of regencies and city in Papua Barat province between 2010 and 2015. Sample in this research includes six regencies and one city. Panel data regression was employed to estimate the fitted model. The result indicated that the effects of balance fund and other lawful local revenues were positive and significant, whereas the influence of region own source revenue was not significant on government expenditure of regency/city in Papua Barat.

Keywords: *governement expenditure, region own revenue, balance fund, other lawful local revenues*

How to Cite: Maspaitella, M.R., Orisu, L.M., Tiwery, R.Y. (2018). Faktor-Faktor Penentu Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. *JFRES: Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*, 1 (1), 1-9. doi:[https:// dx.doi.org/10.32830/jfres.v1i1.1013.g761](https://dx.doi.org/10.32830/jfres.v1i1.1013.g761)

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Implikasi dari kebijakan otonomi daerah tersebut adalah daerah diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta kewenangan untuk memanfaatkan peluang untuk menggali segala potensi daerah yang dimiliki, guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah berdampak bagi perkembangan pembangunan daerah-daerah di Indonesia yang berimplikasi pada peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan, dan jaminan hidup masyarakat yang lebih baik.

Menurut Halim dalam Rahmawati (2010), dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumberdaya alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, dan dana dekonsentrasi. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sedangkan dana dekonsentrasi dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.

Untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan bagian daerah dari dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pembentukan keuangan pemerintah daerah, selain adanya komponen pendapatan ada pula komponen lainnya yang termasuk di dalamnya yaitu pengeluaran pemerintah atau belanja daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah. Belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah komponen belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan komponen belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Sebagai salah satu daerah otonom yang relatif baru, Papua Barat diharapkan dapat memanfaatkan kewenangan yang diberikan dalam rangka melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu 2010 sampai 2015, realisasi belanja daerah provinsi Papua Barat meningkat secara gradual dari Rp. 3,1 triliun menjadi Rp. 6,8 triliun. Dari sisi pendapatan, terjadi peningkatan PAD dari Rp. 125,7 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp. 322,7 miliar pada tahun 2015. Dana perimbangan meningkat dari Rp. 1.4 triliun pada tahun 2010 menjadi hampir Rp 3 triliun pada tahun 2014. Jumlah transfer dana perimbangan kemudian mengalami penurunan hingga mencapai Rp.

2,4 triliun pada 2015. Lain-lain pendapatan yang sah yang diperoleh oleh pemerintah daerah Papua Barat mengalami peningkatan dari 1,8 triliun pada tahun 2010 menjadi lebih dari Rp. 3 triliun pada tahun 2015 (Tabel 1).

Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor penentu belanja daerah di provinsi Papua Barat. Dengan mengeksplorasi basis data APBD di level pemerintah kabupaten/kota, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Papua Barat periode tahun 2010-2015.

METODE PENELITIAN

Sampel dan Data

Sampel penelitian ini meliputi terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota di wilayah provinsi Papua Barat, diantaranya Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat dan Kota Sorong.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif tentang APBD kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan jenis data panel yaitu gabungan antara data *time series* (6 tahun) dan data *cross section* (7 kabupaten/kota), sehingga diperoleh sebanyak 42 *data set* untuk diobservasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS)

kabupaten/kota di Papua Barat. Data yang dianalisis meliputi realisasi belanja daerah, realisasi PAD, realisasi dana perimbangan, dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah kabupaten/kota di provinsi Papua Barat periode 2010-2015.

Metode Analisis Data

Model regresi data panel (*panel data regression*) digunakan untuk mengestimasi model yang diuji. Data panel dapat digunakan untuk mengatasi ketersediaan data untuk mewakili variabel yang digunakan dalam penelitian (Baltagi, 2005). Jika ditemukan bentuk dalam series yang pendek sehingga proses pengolahan data *time series* tidak dapat dilakukan karena jumlah data yang minim. Demikian pula bila ditemukan bentuk data dengan jumlah unit *cross section* yang terbatas, maka sulit melakukan pengolahan data untuk mendapatkan informasi perilaku dari model yang diteliti. Dalam analisis regresi data panel, terdapat tiga pendekatan, yakni *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*.

Model umum analisis regresi data panel dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_{i,t} = a_i + \beta X_{i,t} + e_{i,t}$$

dimana :

a_i : *individual effect*

$X_{i,t}$: vektor variabel penjelas

$e_{i,t}$: *error term*

i : jumlah observasi antar individu

t : jumlah observasi runtun waktu

Tabel 1. Realisasi belanja daerah, PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah Provinsi Papua Barat, 2010-2015 (.000 Rupiah)

Tahun	Belanja Daerah	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang Sah
2010	3.104.771.915	125.774.328	1.462.347.937	1.819.680.723
2011	3.629.959.955	152.163.909	1.483.865.431	2.063.854.826
2012	3.898.931.911	175.450.133	1.516.156.702	2.181.781.583
2013	4.512.430.215	236.282.889	2.992.755.350	2.408.658.394
2014	5.428.849.491	306.674.698	2.783.645.235	2.672.028.269
2015	6.880.166.676	322.799.298	2.496.263.896	3.021.289.926

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Papua Barat, 2015

Hipotesis

Adapun hipotesis yang diuji dalam regresi data panel adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh nyata dari variabel bebas (PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah) terhadap variabel tak bebas (belanja daerah), dengan $\alpha = 1\%$.

$H_1 : \beta \neq 0$, artinya terdapat pengaruh nyata dari variabel bebas (PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah) terhadap variabel tak bebas (belanja daerah), dengan $\alpha = 1\%$.

Software Eviews 7 digunakan dalam mengestimasi model regresi data panel (*common effect, fixed effect, dan random effect*). Kemudian akan dilakukan tiga uji kriteria pemilihan model penelitian yaitu: Uji Statistik F (uji Chow), Uji Langrange Multiplier (LM), dan Uji Hausman untuk menentukan model mana yang paling sesuai untuk mengestimasi pengaruh PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Variabel

Bagian ini menyajikan deskripsi variabel belanja daerah, PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah di tujuh kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian ini. Tabel 2 menyajikan data perkembangan realisasi belanja daerah di daerah sampel.

Tabel 2 menunjukkan bahwa secara umum belanja daerah mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2015. Kabupaten/Kota yang

mengalami peningkatan belanja daerah yang cukup pesat adalah Kabupaten Teluk Bintuni, yakni dari Rp. 712 miliar pada tahun 2010 menjadi hampir mendekati Rp. 2 triliun pada tahun 2015. Selain itu, tren peningkatan belanja daerah Kabupaten Fakfak juga sangat signifikan, yakni dari Rp. 627 miliar pada tahun 2010, dan mendekati dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun, menjadi Rp. 1,171 triliun. Beberapa kabupaten mengalami kenaikan belanja daerah secara gradual, seperti pada Kabupaten Manokwari, Raja Ampat, dan Kota Sorong.

Tabel 3 menunjukkan realisasi PAD kabupaten/kota di Papua Barat tahun 2010-2015. Dari keseluruhan kabupaten/kota tersebut, dilihat bahwa PAD setiap kabupaten berfluktuatif kecuali Kabupaten Teluk Bintuni yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kota Sorong merupakan salah satu daerah yang memiliki PAD tertinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Papua Barat, meskipun pada tahun 2010 dan 2011 didominasi oleh Kabupaten Manokwari dan Raja Ampat. Pendapatan yang tinggi tersebut ditopang oleh kontribusi pajak, retribusi, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Pada tahun 2010, PAD tertinggi adalah Kabupaten Manokwari (Rp. 28,763 miliar), diikuti oleh Kota Sorong (Rp. 26,526 miliar), dan Kabupaten Fakfak (Rp. 20,557 miliar). Dalam kurun waktu lima tahun terjadi perubahan realisasi PAD, dimana PAD tertinggi pada tahun 2015 adalah Kota Sorong (Rp. 86,223 miliar), diikuti Kabupaten Fakfak (Rp. 76,400 miliar), dan Kabupaten Teluk Bintuni (Rp. 54,094 miliar). Secara umum terjadi peningkatan PAD

Tabel 2. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Papua Barat (Miliar Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Manokwari	800.653.765	799.990.368	799.990.368	974.640.590	898.381.430	915.066.110
Fakfak	627.839.578	643.462.060	716.506.964	784.042.666	784.042.666	1.171.868.918
Kota Sorong	524.495.450	548.067.038	700.176.812	711.692.905	842.869.705	928.464.430
Teluk Bintuni	712.910.225	836.290.165	879.371.481	1.103.571.475	1.309.708.438	1.993.846.234
Teluk Wondama	305.913.934	498.859.055	517.742.725	586.005.582	601.794.995	706.962.467
Raja Ampat	673.087.102	664.885.883	704.918.421	796.266.594	962.176.327	982.163.237
Maybrat	250.245.361	389.614.678	436.178.783	374.057.430	610.980.959	807.486.938

Sumber : Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2011-2016.

Tabel 3. Realisasi PAD Kabupaten/Kota di Papua Barat (Miliar Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Manokwari	28.763.973	21.959.986	28.044.312	19.845.240	70.303.180	30.215.280
Fakfak	20.557.095	14.839.034	14.839.034	23.288.314	48.739.897	76.400.161
Kota Sorong	26.526.551	25.142.232	98.443.362	56.277.723	100.020.643	86.223.381
Teluk Bintuni	8.882.412	17.533.957	22.206.764	31.143.598	42.627.971	54.094.801
Teluk Wondama	6.460.742	3.760.680	8.850.295	8.476.327	14.345.589	16.533.112
Raja Ampat	19.566.845	25.372.972	16.988.535	23.500.181	24.143.801	23.900.000
Maybrat	10.825.863	3.417.259	3.158.936	9.594.521	10.912.089	18.529.166

Sumber : Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2011-2016.

Kabupaten/Kota di Papua Barat selama periode 2010-2015. Dengan demikian diharapkan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi dapat memanfaatkan semua potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Dana Perimbangan menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi dana perimbangan kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tahun 2010-2015 disajikan pada Tabel 4. Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota di Papua Barat dalam perkembangannya mengalami fluktuasi, meskipun secara umum dari tahun 2010 ke tahun 2015 terlihat mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, dana perimbangan tertinggi diterima oleh Kabupaten Teluk Bintuni (Rp. 641,040 miliar), selanjutnya Kabupaten Manokwari (Rp. 568,964 miliar), dan Kabupaten Fakfak (Rp. 481,006 miliar). Pada tahun 2015, dana perimbangan tertinggi adalah Kabupaten Teluk Bintuni (Rp. 1,350 triliun), diikuti Kabupaten Raja Ampat (Rp. 859,122 miliar), dan Kabupaten Fakfak (Rp. 832,076 miliar). Secara keseluruhan, tingginya Dana Perimbangan ditopang oleh dana alokasi umum (DAU) yang merupakan salah satu bentuk dana transfer dari pemerintah pusat.

Tabel 5 menyajikan data realisasi lain-lain pendapatan yang sah kabupaten/kota di Papua Barat tahun 2010-2015. Lain-lain Pendapatan yang sah merupakan salah satu penerimaan daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan

PAD. Komponen lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus.

Data pada Tabel 5 menunjukkan perkembangan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah dari tahun 2010-2015 yang berfluktuatif, meskipun demikian pada tahun 2015 penerimaan pendapatannya lebih tinggi dari tahun 2010, kecuali Kabupaten Raja Ampat yang mengalami penurunan. Pada tahun 2015, penerimaan lain-lain pendapatan yang sah tertinggi adalah Kabupaten Fakfak (Rp. 352,568 miliar). Hal ini ditopang oleh adanya kontribusi yang tinggi pula dari komponen pendapatan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan/atau kabupaten lainnya (Rp.194,159 miliar) dan komponen pendapatan dari dana penyesuaian dan otonomi daerah (Rp.157,159 miliar). Kabupaten Raja Ampat adalah daerah yang memiliki lain-lain pendapatan yang sah terendah, yakni Rp. 109,140 miliar. Secara keseluruhan, tingginya lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2015 pada kabupaten/kota tersebut ditopang oleh tingginya dana penyesuaian dan otonomi daerah.

Hasil Estimasi Model Data Panel

Estimasi regresi data panel merupakan teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* (lihat Tabel 6).

Tabel 4. Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Papua Barat (Miliar Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Manokwari	568.964.837	618.521.740	704.456.081	825.564.800	545.433.800	669.563.140
Fakfak	481.006.338	556.692.639	556.692.639	680.926.175	764.683.378	832.076.914
Kota Sorong	342.710.817	401.315.578	486.711.341	555.319.265	559.912.560	578.302.914
Teluk Bintuni	641.040.738	732.137.687	682.713.998	1.157.454.382	1.081.628.754	1.350.640.564
Teluk Wondama	326.202.067	266.124.123	437.806.715	522.288.499	528.655.677	514.095.189
Raja Ampat	469.276.403	529.108.561	592.897.060	670.820.236	767.654.577	859.122.624
Maybrat	190.268.450	399.448.362	346.855.514	335.930.930	501.207.418	508.258.609

Sumber : Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2011-2016.

Tabel 5. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten/Kota di Papua Barat (Miliar Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Manokwari	161.117.944	224.253.885	166.835.166	180.276.700	227.126.470	282.315.000
Fakfak	123.671.900	103.483.275	103.483.275	148.731.130	179.483.952	352.568.722
Kota Sorong	172.145.331	144.468.369	189.672.323	151.292.453	207.579.604	199.513.853
Teluk Bintuni	107.350.226	130.480.319	139.896.949	227.575.911	376.815.104	351.103.148
Teluk Wondama	66.532.022	89.018.923	69.509.086	76.262.359	100.959.162	125.419.629
Raja Ampat	143.426.629	114.635.947	117.515.233	146.032.925	147.407.581	109.140.613
Maybrat	58.581.175	94.421.743	82.293.452	44.933.489	153.794.007	218.570.778

Sumber : Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2011-2016.

Hasil analisis dengan pendekatan *common effect* menggunakan asumsi bahwa koefisien baik intersep maupun slope adalah sama antar waktu dan antar kabupaten/kota. Hasil regresi menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas berpengaruh positif terhadap belanja daerah, tetapi hanya dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah yang berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Nilai F-statistic yang lebih rendah dari 0.01 menunjukkan bahwa secara simultan belanja daerah dipengaruhi oleh ketiga variabel yang diuji. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,92 berarti bahwa model mampu menjelaskan variasi belanja daerah sebesar 92%.

Analisis dengan metode *fixed effect* menggunakan asumsi bahwa intersep berbeda antar kabupaten/kota, sedangkan slope tetap sama antar kabupaten/kota. Hasil pengujian regresi data panel dengan pendekatan ini menunjukkan bahwa variabel PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah memberikan

pengaruh yang positif terhadap belanja daerah. Namun, berdasarkan uji t, variabel dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah yang berpengaruh signifikan pada $\alpha = 1\%$. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara serempak ketiga variabel independen yang dimasukkan ke dalam model berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 93%.

Hasil analisis dengan menggunakan pendekatan *random effect* menggunakan asumsi bahwa intersep antara kabupaten/kota adalah berbeda. Hasil regresinya tidak berbeda dengan kedua metode sebelumnya, yakni PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah menunjukkan pengaruh signifikan. Uji F menunjukkan bahwa ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dengan R^2 sebesar 92%.

Tabel 6. Hasil Estimasi Data Panel

Model Common Effect				
Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
(Constant)	0,937071	0,547697	1,710931	0,0952
X1 (PAD)	0,037476	0,030103	1,244925	0,2208
X2 (Dana Perimbangan)	0,663755	0,062455	10,62769	0,0000
X3 (Lain Pdptn yang sah)	0,244796	0,062738	3,901905	0,0004
R-squared	0,923905		Sum squared resid	0,084354
Adjusted R-squared	0,917897		F-statistic	153,7919
Durbin-Watson	2,198754		Prob. (F-statistic)	0,000000
Model Fixed Effect				
Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
(Constant)	1,275250	0,874251	1,458677	0,1544
X1 (PAD)	0,043373	0,043686	1,992844	0,3282
X2 (Dana Perimbangan)	0,595633	0,096018	6,203337	0,0000
X3 (Lain Pdptn yang sah)	0,280783	0,071931	3,903518	0,0005
R-squared	0,930719		Sum squared resid	0,076800
Adjusted R-squared	0,911234		F-statistic	47,76557
Durbin-Watson	2,217567		Prob. (F-statistic)	0,000000
Model Random Effect				
Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
(Constant)	0,937071	0,569488	1,645463	0,1081
X1 (PAD)	0,037476	0,031301	1,197288	0,2386
X2 (Dana Perimbangan)	0,663755	0,064940	10,22103	0,0000
X3 (Lain Pdptn yang sah)	0,244796	0,065234	3,752601	0,0006
R-squared	0,923905		Sum squared resid	0,084354
Adjusted R-squared	0,917897		F-statistic	153,7919
Durbin-Watson	2,198754		Prob. (F-statistic)	0,000000

Sumber : Data diolah, 2018

Pemilihan Model Estimasi

Uji Chow diaplikasikan untuk memilih antara model *common effect* dan *fixed effect*. Hipotesisnya adalah bahwa metode *common effect* dipakai jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, sebaliknya model *fixed effect* yang akan digunakan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$. Hasil perhitungan nilai F-statistic adalah sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{(RSSR - USSR) / (N - 1)}{USSR / (NT - N - K)}$$

$$F_{hitung} = \frac{(0,084354 - 0,076800) / (7 - 1)}{0,076800 / (7 \times 6 - 7 - 3)}$$

$$F_{hitung} = 0,5264$$

Dari hasil estimasi uji Chow diperoleh nilai $F_{hitung} = 0,5246$ sementara nilai statistik F kritis dengan numerator $(N-1) = 6$ dan denominator $(NT-N-K) = 32$ pada $\alpha = 5\%$ adalah 2,399. Karena F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} maka model

data panel yang tepat digunakan adalah *common effect*.

Untuk pemilihan model estimasi antara *fixed effect* dan *random effect*, digunakan uji Hausman. Hipotesisnya adalah bahwa model *random effect* diterima jika nilai Hausman lebih kecil dari nilai *chi-square*, sedangkan model *fixed effect* yang digunakan apabila nilai Hausman lebih besar dari nilai *chi-square*. Dari pengujian Hausman menggunakan Eviews 7 diperoleh nilai *c-square* statistik adalah 1,722. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai *chi-square* kritis/tabel pada $\alpha = 5\%$. Nilai *chi-square* statistik lebih kecil dari pada nilai *chi-square* kritis ($\alpha = 5\%$ yaitu 7,814), sehingga model yang lebih baik digunakan adalah model *random effect*.

Uji *Langrange Multiplier (LM)* digunakan untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih

baik dari model *common effect*. Hipotesisnya adalah bahwa model *common effect* yang diterima apabila nilai LM lebih kecil dari nilai chi-square kritis, sebaliknya model *random effect* yang digunakan jika nilai LM lebih besar dari nilai chi-square kritis. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n [\sum_{t=1}^T e_{it}]^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2$$

$$LM = 51,45$$

Nilai chi-square tabel dengan $df = 3$ dan $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 7,814. Dengan demikian maka nilai LM statistic (51,45) lebih besar dari nilai kritis chi-square (7,814), sehingga estimasi yang tepat untuk model regresi data panel yaitu metode *random effect*.

Dari ketiga pengujian tersebut, maka metode data panel yang layak dan tepat untuk digunakan dalam menganalisis penentu belanja daerah kabupaten/kota di provinsi Papua Barat adalah model *random effect*. Model persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = 0,937 + 0,037X_1 + 0,664X_2 + 0,245X_3 + e$$

Interpretasi Model dan Pembahasan

Dari model yang dihasilkan, maka pengaruh variabel-variabel penentu belanja daerah kabupaten/kota di Papua Barat dapat dijelaskan secara lebih detail.

PAD berpengaruh positif pada $\alpha = 1\%$. Nilai koefisien sebesar 0.0375 menyatakan bahwa dalam kondisi *ceteris paribus*, kenaikan 1 satuan pada PAD akan mengakibatkan penambahan sebesar 0,04 satuan (4%) pada belanja daerah. Pengaruh PAD yang sangat kecil ini dibuktikan juga dengan uji signifikansi, dimana nilai p-value cukup tinggi, yakni 0,2386. Hasil ini juga mengkonfirmasi beberapa penelitian terdahulu seperti Maspaitella (2010), Rosy dan Gusti (2014), Dessy (2015), dan Ridho (2011) bahwa PAD tidak secara signifikan menentukan belanja daerah.

Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 1\%$ ($sign. = 0,000$). Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya dana perimbangan akan berdampak positif terhadap belanja daerah. Koefisien regresi sebesar 0,664

artinya apabila terjadi kenaikan variabel dana perimbangan sebesar 1 satuan, dan kondisi lainnya dianggap tidak berubah, maka akan menaikkan jumlah belanja daerah sebesar 0,66 satuan (66%). Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa daerah kabupaten/kota di Papua Barat masih memiliki ketergantungan fiskal yang sangat tinggi kepada transfer keuangan dari pemerintah pusat. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridho (2011), dan Rosy dan Gusti (2014) yang menyatakan bahwa dana perimbangan merupakan komponen utama dalam penentuan belanja daerah. Selain itu, hasil penelitian ini mendukung hasil kajian Dessy (2015), yang secara lebih rinci menguraikan bahwa komponen-komponen dana perimbangan seperti DAU dan dana bagi hasil merupakan faktor yang signifikan berpengaruh terhadap belanja daerah.

Hasil estimasi menunjukkan koefisien lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif dan signifikan ($p\text{-value} = 0,0006$) terhadap belanja daerah pada level kepercayaan 1%. Koefisien regresi sebesar 0,245 memberikan arti bahwa apabila terjadi kenaikan variabel lain-lain pendapatan yang sah sebesar 1 satuan, maka dalam kondisi *ceteris paribus*, akan menaikkan jumlah belanja daerah sebesar 0,245 satuan (25%). Hasil penelitian ini tidak searah dengan penelitian dari yang dilakukan oleh Yohanes (2016) di Kota Balikpapan yang menyatakan bahwa pengaruh lain-lain pendapatan yang sah tidak signifikan terhadap belanja daerah. Penjelasan yang logis atas kondisi ini adalah karena status Papua Barat sebagai daerah otonomi khusus yang mendapatkan dukungan dana otonomi khusus setiap tahunnya. Dana otonomi khusus yang dialokasikan melalui pos lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, sehingga variasi belanja daerah juga ditentukan oleh sumber pembiayaan ini.

Secara keseluruhan, implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa daerah-daerah kabupaten/kota di Papua Barat masih perlu mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi di wilayahnya agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber-sumber peningkatan PAD. Selain itu, ketergantungan atas transfer dana dari pemerintah pusat juga perlu dikurangi agar semangat desentralisasi

yang mengusung kemandirian fiskal dapat terealisasi di setiap kabupaten/kota di Papua Barat.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah di kabupaten/kota di Papua Barat. Dari hasil analisis dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, pengaruh PAD terhadap belanja daerah tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya PAD tidak menjadi penentu utama bagi pemerintah daerah dalam hal melakukan belanja daerah. Kedua, dana perimbangan lain-lain pendapatan yang sah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat, baik dana perimbangan maupun dana otonomi khusus, masih merupakan komponen utama dalam belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah diharapkan dapat terus menggali semua potensi yang ada di daerah, sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Upaya-upaya peningkatan PAD sangat diperlukan guna memacu kemandirian fiskal daerah, dan pada saat yang bersamaan dapat mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupate/kota Provinsi Papua Barat 2011-2016. *Kabupaten/kota Papua Barat Dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat. 2010-2015. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Papua Barat*.
- Dessy Tri Wulansari. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta analisis Fly-paper Effect*. Naskah Publikasi. Surakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta, Indonesia : Salemba Empat.
- Kuncoro, Murdajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta. Erlangga

Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang *Penerimaan Daerah*.

Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Maryanti, ulfi dan Endrawati. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, vol 5, No2, Desember 2010.

Maspaitella, M. R. 2010. *Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Tanah Papua)*. *Lensa Ekonomi*. Volume 4, Nomor 1 Juli 2010. 45-49.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005, tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang *Pengeolaan Keuangan Daerah*

Rahmawati, Nur Indah. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. *Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang*.

Ridho Argi. 2011. *Analisis Belanja Daerah dan Faktor faktor Yang Mempengaruhinya di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2009*. Skripsi. Semarang.

Rosy Puspita Sari, I Gusti Bagus Indrajaya. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Badung*. *E-Jurnal EP Unud*, 3 [9]: 420-427.

Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta Indonesia: Grafindo

Yohanes Eko Adventino. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap Belanja Daerah di Kota Balikpapan*. Skripsi. Yogyakarta.